

KOALISI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DAN PARTAI DEMOKRAT PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KALIMANTAN BARAT TAHUN 2012 (Studi Kasus Pemilihan Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012)

*Coalition of Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan and Partai Demokrat
On Election of Regional Leaders in 2012 West Kalimantan
(A Case Study of 2012 Governor Election in West Kalimantan)*

Bambang Irawan¹, Saherimiko², Amadi³

Program Studi Ilmu Politik
Magister Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak

ABSTRAK

Koalisi yang terbangun antara Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) dengan Partai Demokrat (PD) pada pemilihan gubernur Kalimantan Barat tahun 2012 merupakan koalisi yang bersifat pragmatis. Hal ini dikarenakan koalisi tersebut tidak dibangun dengan pondasi yang kokoh (*permanent*) dan bersifat jangka pendek dan hanya untuk mendukung kemenangan pencalonan kembali pasangan *incumbent*. Dalam hal ini PD bersedia menjalin koalisi dengan PDIP dikarenakan di tubuh PD tidak terdapat kader yang memiliki elektabilitas untuk memenangkan pemilihan gubernur, sehingga pilihannya adalah mengusung kadernya sebagai wakil untuk berkoalisi dengan PDIP mendampingi Cornelis sebagai calon gubernur. Koalisi ini juga merupakan hasil dari komunikasi politik berupa lobi-lobi yang dilakukan oleh kedua elit partai tersebut di tingkat daerah dan pusat. Terbentuknya koalisi ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu figur Cornelis seperti : keberhasilan pembangunan yang ditunjukkan oleh incumbent, kesamaan garis perjuangan partai, pragmatisme politik partai dan kelonggaran sistem pemerintahan.

Kata Kunci : Koalisi, Partai, Pemilu.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Kecenderungan umum dalam Pemilu adalah terbentuknya koalisi partai-partai politik untuk mengusung kandidat. Landasan koalisi bisa berupa faktor teknis, karena kurang memenuhi syarat untuk dapat mengajukan kandidat sendiri. UU No. 32 Tahun 2004 mensyaratkan bahwa partai yang hendak mengajukan calon memiliki minimal 15% suara atau kursi sebagaimana dikemukakan pada penjelasan sebelumnya. Syarat ini membuat banyak partai melakukan koalisi. Koalisi juga dibangun berdasarkan landasan untuk memenangkan kandidat yang diusung. Melakukan koalisi dengan banyak partai, diharapkan sumber dukungan terhadap calon akan besar.

¹ Wirawasta - Kabupaten Bengkayang

² Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak

³ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak

Pelaksanaan Pemilu pada Provinsi Kalimantan Barat tahun 2012 diikuti oleh 4 (empat) pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Dari empat pasang calon gubernur tersebut, terdapat fenomena menarik yang sangat jarang terjadi dalam Pemilu di Kalimantan Barat, yaitu pada pasangan nomor urut 1 yaitu Cornelis dan Christiandy Sanjaya. Dikatakan menarik karena calon tersebut maju dengan diusung oleh koalisi besar yang terdiri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Demokrat (PD), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Indonesia Baru (PPIB) dan Partai Damai Sejahtera (PDS). Koalisi ini dapat dikatakan sebagai koalisi penuh warna, karena partai politik Islam berkoalisi dengan partai nasionalis, bahkan dengan partai Kristen. Selain itu, partai politik yang di tingkat nasional bersebarangan, di tingkat lokal menjalin koalisi. Tanpa mengesampingkan koalisi dengan partai lain, yang menjadi sorotan dan dapat dikatakan sesuatu yang tidak lazim adalah koalisi yang terbangun antara PDIP yang mengusung Cornelis sebagai Calon Gubernur dan PD yang mengusung Christiandy Sanjaya sebagai Calon Wakil Gubernur.

Kendati pasangan ini merupakan *in-cumbens*, tetapi pada waktu periode pertama menjadi gubernur dan wakil gubernur, wakil gubernur Christiandy Sanjaya saat itu belum menjadi anggota/kader Partai Demokrat, dan pernah aktif sebagai pengurus PDS sebelum bergabung ke Partai Demokrat dan menduduki jabatan Ketua Majelis Partai Daerah. Koalisi yang terbangun antara PDIP dan PD pada Pilgub periode tahun 2013-2018 dapat dikatakan sebagai sesuatu yang tidak lazim. Hal ini dikarenakan di level pemerintahan pusat, PD adalah partai yang memerintah (*the ruling party*), sementara PDIP berada pada oposisi (*oposition party*). Belum lagi jika merujuk sejarah ke belakang bagaimana kita melihat ketidakharmonisan hubungan elit antara PDIP dan PD di tingkat nasional. Sudah bukan menjadi rahasia lagi kalau hubungan petinggi partai PDIP (Megawati Soekarno Putri) selaku Ketua Umum dan PD (Susilo Bambang Yudoyono) selaku Ketua Dewan Pembina kurang memiliki hubungan yang baik.

Melihat jumlah kursi yang merepresentasikan perolehan suara PD di DPRD Provinsi Kalimantan Barat, kekuatan politik PD tidak bisa dipandang sebelah mata. Hal ini dikarenakan PD memperoleh suara yang cukup besar dan sangat memungkinkan untuk mencalonkan sendiri kadernya menjadi calon gubernur. Akan tetapi dengan berbagai pertimbangan justru PD yang merupakan partai pemerintah lebih memilih berkoalisi dengan PDIP untuk mengusung kadernya sebagai calon wakil gubernur.

Koalisi yang terbangun antara PDIP dan PD dapat dikatakan sebagai koalisi yang cair dan rapuh. Kendati untuk jangka pendek koalisi tersebut terlihat berhasil dengan dibuktikan oleh kemenangan mutlak pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat. Koalisi yang harusnya terbangun adalah koalisi yang permanen, yaitu koalisi yang terbangun dari adanya nilai-nilai bersama, tujuan politik yang sama dengan adanya konsensus dan kontrak politik untuk mempertahankan koalisi. Bukanlah koalisi pragmatis yang hanya berdasarkan kepentingan sesaat untuk merebut kekuasaan.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Fokus penelitian ini pada proses koalisi dua partai besar yaitu PDIP dan PD di Kota Pontianak

3. Perumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah: "bagaimana proses koalisi yang terjalin antara PDIP dan Partai Demokrat pada pemilihan Gubernur Kalimantan Barat tahun 2012 ?

TINJAUAN PUSTAKA

Proses terjadinya koalisi partai politik dalam pemilihan kepala daerah tidak lepas dari peran para elit politik. Sejalan dengan itu untuk memperkuat analisis penelitian ini penulis juga akan menyampaikan beberapa tinjauan mengenai elit politik. Menurut Aristoteles (dalam Chilcote 2003:476). Elit adalah sejumlah kecil individu yang memikul semua atau hampir semua tanggungjawab kemasyarakatan. Definisi elit yang dikemukakan oleh Aristoteles

merupakan penegasan lebih lanjut dari pernyataan Plato tentang dalil inti teori demokrasi elitis klasik bahwa di dalam setiap masyarakat, suatu minoritas membuat keputusan-keputusan besar.

Dalam hubungannya dengan kekuasaan politik, Apter (1985:220) memberi gambaran tentang kondisi politik yang menimbulkan suatu agama politik disuatu masyarakat, yaitu kondisi politik yang terlalu sentralistis dengan peranan birokrasi atau militer yang terlalu kuat. Budaya politik para elit berdasarkan budaya politik agama tersebut dapat mendorong atau menghambat pembangunan karena masa rakyat harus menyesuaikan diri pada kebijaksanaan para elit politik. Relevansi dengan penelitian ini adalah proses koalisi yang terbangun antara PDIP dan PD di Pilgub Kalbar Tahun 2012 merupakan budaya politik para elit partai yang mungkin saja keputusannya tanpa melibatkan konsilien.

Menurut Friedrich, (dalam Budiardjo, 2006:161) partai politik adalah :“sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut dan mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan, berdasarkan penguasaan ini partai politik memberikan kepada anggotanya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun materil” (*a political party is a group of human beings, stably organized with the objective of securing or maintaining for its leaders the control of a government, with the further objective of giving to members of the party through such control ideal and material benefits and advantages*)”. Berdasarkan pandangan tersebut dapat dikatakan partai politik merupakan sebuah organisasi yang memiliki unsur-unsur seperti halnya organisasi modern dan individu-individu yang memiliki orientasi untuk menempatkan anggotanya di dalam sebuah pemerintahan, dengan menempatkan anggotanya menunjukkan bahwa partai politik telah mewujudkan tujuan dan cita-citanya untuk memperoleh kekuasaan”.

Menurut Budiardjo (2006:164-165) dalam negara demokratis partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi, yaitu

- a. Partai politik sebagai sarana komunikasi politik.
- b. Partai Politik sebagai sarana sosialisasi politik.
- c. Partai Politik sebagai sarana rekrutmen politik.
- d. Partai politik sebagai sarana pengatur konflik (*conflict management*).

Berdasarkan fungsi partai politik tersebut, dalam kaitannya dengan penelitian ini. Proses pemilihan Gubernur Kalimantan Barat dapat dikategorikan sebagai pelaksanaan fungsi partai politik dalam melakukan rekrutmen politik. Partai politik merupakan instrumen politik yang memiliki salah satu fungsi sebagai sarana rekrutmen politik, guna menghasilkan calon-calon pimpinan politik, untuk dipersiapkan menduduki jabatan legislatif dan eksekutif baik di pusat melalui pemilu. Melalui rekrutmen politik juga akan menjamin kontinuitas partai politik, dan kelestarian partai politik. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Macridis (1996:21) bahwa partai politik merupakan suatu kelompok yang mengajukan calon-calin bagi pejabat publik untuk dipilih oleh rakyat sehingga dapat mengontrol atau mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah.

Secara harfiah pengertian koalisi adalah penggabungan. Koalisi merupakan kelompok individu yang berinteraksi yang sengaja dibentuk secara independen dari struktur organisasi formal, terdiri dari keanggotaan yang dipersepsikan saling menguntungkan, berorientasi masalah atau isu, menfokuskan pada tujuan di luar koalisi, serta memerlukan aksi bersama para anggota. Dalam khazanah politik, koalisi merupakan gabungan dua partai atau lebih dengan tujuan untuk membentuk secara bersama satu pemerintahan. Koalisi merupakan suatu keniscayaan yang tak bisa dihindari dalam proses bangsa yang mengadopsi sistem multipartai. (Lijphart, 1995:221).

Dalam sistem pemerintahan yang multi partai, koalisi adalah suatu keniscayaan untuk membentuk pemerintahan yang kuat. Hakekat koalisi sendiri adalah untuk membentuk pemerintahan yang kuat (*strong*), mandiri (*autonomuos*), dan tahan lama (*durable*). Namun sering kali koalisi yang dibangun membingungkan. Kompleksnya kekuatan politik, aktor dan ideologi menjadi faktor yang menyulitkan. Secara teoritis, koalisi partai hanya akan berjalan bila dibangun diatas landasan pemikiran yang realitis dan layak (Bambang, 2000:22).

Riker (dalam Gaffar, 1999:123) memaknai koalisi politik sebagai berikut “.....*three-or-more person games, the main activity of the players is to select not only strategies, but partners.*

Partners once they become such, then select a strategy". Pada saat para rekanan (partner) ini bergabung, dan bekerjasama hanya dengan sejumlah aktor lain, dan menghadapi aktor-aktor lain diuar mereka, setiap koalisi pada dasarnya mencari pengaruh diantara aktor-aktor tanpa adanya mediasi yang berbentuk material oleh karena bersifat politis.

Berdasarkan pandangan di atas, sebuah koalisi harus menyusun strategi yang sesuai dengan aktivitas para aktor dan partner koalisi. Disini suatu platform bersama menjadi pijakan suatu koalisi dalam menghadapi aktor-aktor yang menjadi lawan mereka. Jadi koalisi memerlukan adanya rekan (*partner*), lawan (*adversaries*) dan strategi. Koalisi politik tidak didasarkan pada tujuan-tujuan yang bersifat material melainkan tujuan yang bersifat politis.

Menurut Dahl (dalam Yudha, 2010:67) salah satu cara penyelesaian dalam kondisi pluralisme sub-kultural yang ekstensif adalah perlu dikembangkannya bentuk demokrasi konsosiasional yaitu sebuah koansi besar para elit atau pemimpin politik dari semua bagian yang penting dari masyarakat majemuk.

Koalisi menurut Lijphart (1995:231) dapat dikelompokkan secara garis besar menjadi dua kelompok yaitu koalisi yang tidak didasarkan atas pertimbangan kebijakan (*policy blind coalitions*) dan koalisi yang didasarkan pada preferensi tujuan kebijakan yang hendak direalisasikan (*policy based colitions*). Bentuk koalisi kelompok pertama menekankan prinsip ukuran atau jumlah kursi di parlemen, minimal *winning coalitions* dan asumsi partai bertujuan "*office seeking*" (memaksimalkan kekuasaan). Bentuk koalisi seperti loyalitas pemerintah koalisi tidak terjamin dan sulit diprediksi.

Mengacu pada teori Lijphart (1995:231) setidaknya terdapat empat teori koalisi yang bisa ditetapkan, yaitu:

- 1) *Minimal Winning Coalition.*
- 2) *Minimum Size Coalition.*
- 3) *Bargaining Proposition.*
- 4) *Minimal Range Coalition.*

Marketing politik adalah istilah yang lebih sering digunakan dalam dunia akademis dan praktek di Eropa dari pada di Amerika Serikat (Scammell, 1999). Perbedaan antara pemasaran politik, manajemen politik, atau komunikasi politik tidak selalu jelas dan sering dikaburkan oleh tumpang tindih interpretasi. Namun, marketing politik sering membangkitkan perasaan negara dan dianggap berbahaya bagi politik dan negara demokrasi (Lilleker, 2005).

Henneberg (2007) berpendapat penggunaan marketing dalam politik menyiratkan arofi dan kelainan. Dalam penelitian lebih lanjut, Henneberg telah mengumpulkan beberapa hal tentang kritik oleh para ilmuwan politik dan ahli teori marketing. Menurut Firmansyah (2008:203), dalam proses *Political Marketing*, digunakan penerapan 4Ps bauran marketing, yaitu:

1. Promosi (*promotion*)
2. Harga (*Price*).
3. Penempatan (*place*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode kualitatif, dengan jenis penelitian studi kasus. Dalam penelitian ini akan dianalisis dan dideskripsikan kasus koalisi yang terbangun antara PDIP dan PD dalam pemilihan Gubernur Kalimantan Barat tahun 2012 yaitu bagaimana koalisi dibangun, dampak koalisi dan manfaat koalisi terhadap kemenangan calon gubernur dan wakil yang diusung oleh koalisi tersebut. Sebagai sumber data penelitian ini menggunakan informan yang terdiri dari Pengurus DPD PDIP dan Pengurus DPD PD Provinsi Kalimantan Barat, serta Kosituen PDIP dan PD. Proses pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tehnik wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Pada tahap analisis data penulis menggunakan tehnik analisis data kualitatif dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN

1. Analisis Proses Koalisi PDIP dan PD Pada Pemilihan Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012

Hasil penelitian berkenaan dengan proses terbentuknya koalisi antara PDIP dan PD pada pemilihan gubernur Kalimantan Barat tahun 2012 akan diuraikan pada penjelasan berikut :

a. Proses Koalisi

Cornelis dan Chirstaindy sebagai pasangan *incumbet* yang kembali maju sebagai calon gubernur Kalimantan Barat merupakan hasil dari fungsi rekrutmen parpol yang mengusung kadernya untuk maju sebagai gubernur. Cornelis merupakan kader dari PDIP yang dalam struktur kepengurusan DPD menjabat sebagai Ketua DPD PDIP, sementara Christiandi yang diusung oleh PD, dalam kepengurusan DPD PD merupakan Ketua Majelis Partai Daerah.

Sebelum terjadinya koalisi antara PDIP dan PD dalam mengusung Cornelis dan Chirstaindy pada pilgub Kalbar tahun 2012. Masing-masing partai melakukan proses rekrutmen calon pemimpin yang dilakukan melalui sistem dan mekanisme partai masing-masing. Pada pelaksanaan pemilihan Gubernur Kalimantan Barat tahun 2012 DPD PDIP Provinsi Kalimantan Barat kembali mengusung Cornelis sebagai calon gubernur, yang juga masih menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Barat. Terkait dengan mekanisme penunjukan Cornelis untuk kembali menjadi calon gubernur periode 2013-2018, penulis melakukan wawancara dengan M. Kebing, L. Selaku Sekretaris DPD PDIP Provinsi Kalimantan Barat. Dalam wawancara dikatakan bahwa : “keputusan untuk mengusung kembali Cornelis sebagai Calon Gubernur pada pemilihan gubernur Kalimantan Barat tahun 2012, dengan pertimbangan bahwa selama memimpin pak Cornelis dinilai berhasil dalam pembangunan Kalbar, seperti peningkatan DAU dan DAK untuk Kalbar, pertumbuhan ekonomi, peningkatan IPM dan pembangunan di daerah pedalaman. Oleh karena itu DPD PDIP kompak untuk mengusung kembali pak Cornelis sebagai calon gubernur, namun demikian usulan ini juga harus mendapat persetujuan dari DPP”.

Keterangan tersebut, memberikan gambaran bahwa dalam mekanisme penentuan calon kepala daerah (gubernur) elit partai di tingkat DPD juga memiliki kontribusi dalam mengusung nama yang mereka anggap sebagai figur potensial yang dapat memenangkan pemilihan gubernur Kalimantan Barat. Selain adanya dukungan dari DPD, pemilihan Cornelis untuk maju kembali sebagai calon gubernur juga tidak lepas dari peran DPP. Tidak dapat dipungkiri bahwa di dalam tubuh PDIP pengambilan keputusan partai juga dipengaruhi atau ditentukan dari keputusan para elit di PP. Dalam konteks Cornelis yang juga sebagai Ketua DPD PDIP Provinsi Kalimantan Barat, sudah tidak menjadi rahasia jika beliau memiliki hubungan yang baik dengan para elit di tingkat pusat (DPP) khususnya dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Kinerja pembangunan selama lima tahun yang diapresiasi oleh DPP tentu merupakan salah satu pertimbangan DPP memberikan dukungan kepada Cornelis, namun disamping itu perlu diingat juga bahwa selain berkontribusi bagi pembangunan Kalimantan Barat, Cornelis juga dinilai berhasil untuk mempertahankan dominasi suara PDIP di Kalimantan Barat dalam pelaksanaan pemilihan umum beberapa tahun terakhir. Di bawah kepemimpinan Cornelis PDIP Kalbar menjadi partai yang solit dan jarang terdengar konflik internal partai yang dapat mengganggu eksistensi partai.

Selanjutnya, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah, bahwa parpol dan gabungan parpol itu adalah satu paket, artinya setiap partai pengusung harus mencalonkan satu paket pasangan yaitu calon kepala daerah dan wakil kepala daerah (gubernur dan wakil gubernur). Sejalan dengan itu, maka PDIP dalam mengusung Cornelis sebagai Calon Gubernur harus mencari pendamping sebagai calon wakil gubernur untuk diduetkan dalam pemilihan gubernur Kalbar tahun 2012.

Setelah menetapkan Cornelis sebagai calon gubernur, DPD PDIP perjuangan selanjutnya harus mencari pendamping Cornelis untuk maju pada pemilihan gubernur

Kalimantan Barat. Berkenaan dengan calon wakil yang akan diusung oleh PDIP, hasil wawancara penulis dengan M. Keding, L. Sekretaris DPD PDIP Perjuangan memberikan keterangan sebagai berikut : “penentuan sosok yang akan mendampingi Pak Cornelis untuk kembali maju sebagai calon gubernur, bisa berasal dari dalam maupun luar partai. Dalam menentukan calon wakil gubernur, PDIP juga memiliki mekanisme penjangkaran, dimana calon pendamping tersebut mendapatkan dukungan dari DPC dan DPD serta disetujui oleh DPP. Dengan ketentuan bahwa sosok yang akan mendampingi pak Cornelis harus memiliki elektabilitas tinggi, yang setidaknya dapat membantu mendongkrak perolehan suara”.

Keterangan tersebut, menunjukkan bahwa PDIP dalam menentukan calon pendamping Cornelis cenderung fleksibelitas, artinya bahwa tidak menutup kemungkinan untuk merekrut orang-orang dari luar partai baik dari kalangan profesional maupun kader partai lainnya yang mau diajak berkoalisi. Lebih lanjut dari keterangan hasil wawancara dapat dikemukakan bahwa aspek utama dalam menentukan calon wakil gubernur adalah mampu mendongkrak perolehan suara. Hal ini menunjukkan bahwa calon wakil yang akan dipilih harus memiliki basis massa yang banyak. Jika mengamati hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa sosok yang dijadikan sebagai wakil gubernur sebagai representasi basis massa tersebut merupakan tokoh masyarakat, tokoh agama, politisi dan lain-lain.

Proses rekrutmen yang dilakukan oleh DPD PDIP Kalimantan Barat dalam pemilihan gubernur Kalimantan Barat tahun 2012, juga dilaksanakan oleh PD. Berdasarkan perolehan suara pemilu legislatif tahun 2009, PD menempati urutan kedua setelah PDIP. Dengan kekuatan politik yang dimiliki, terbuka peluang DP untuk mengusungkan calonnya sebagai calon gubernur Kalimantan Barat. PD sebagai partai pemenang pemilu juga perlu menunjukkan eksistensinya tidak hanya ditingkat pusat tetapi juga di daerah dengan berjuang menempatkan kader-kader terbaiknya pada jabatan kepala daerah.

Dalam rangka menghadapi pemilihan gubernur, PD pun melaksanakan proses rekrutmen calon gubernur dan wakil gubernur. Terdapat beberapa nama bakal calon yang melakukan pendekatan, sebagaimana yang dikemukakan Koordinator tim 9 DPD PD Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini sebagaimana terungkap dari hasil wawancara penulis dengan Ketua DPD PD Suryadman Gidot terkait proses penjangkaran bakal calon gubernur yang didukung PD, dengan memberikan keterangan sebagai berikut : “gagasan awal untuk koalisi tidak terlepas dari proses penjangkaran calon gubernur yang dilakukan oleh PD, dimana sesuai dengan mekanisme partai, setiap calon yang akan diusung harus melalui proses penjangkaran dengan dibentuknya Tim 9. Adapun Tim 9 dalam proses penjangkaran calon gubernur Kalbar tahun 2012 terdiri dari :Saah Mustofa anggota DPP; Gondo Gambiro anggota DPP; Albert Yaputra anggota DPP; Lim Sui Kiang anggota DPP; Sudewo anggota DPP; Suryatman Gidot anggota DPD; S. Marsardi Kapat anggota DPD; Bobby Chasnawan anggota DPD, dan Paryadi anggota DPD. Adapun tujuan dibentuknya tim 9 tersebut adalah untuk melakukan investigasi (survei) untuk penjangkaran calon gubernur dan wakil gubernur pada pilgub Kalbar tahun 2012”

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari sekretariat DPD PD Provinsi Kalimantan Barat, diketahui bahwa banyak calon gubernur yang mendaftarkan diri di PD. Nama-nama yang mendaftar itu adalah Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kalbar yang juga Gubernur, Cornelis, Ketua DPD PD Kalbar Suryadman Gidot, bekas Bupati Kapuas Hulu Abang Tambul Husin, Bupati Sintang Milton Crosby, bekas Bupati Sambas Burhanudin Abdullah, Ketua Yayasan Universitas Panca Bhakti (UPB) Suhardi Dharmawan, Wakil Gubernur (Wagub) Kalbar Christuandi Sanjaya dan bekas Kepala Staf Kodam (Kasdam) XII Tanjungpura, Arminy Angkasa Aliyand. Banyaknya calon kandidat yang mendaftarkan diri sebagai calon gubernur di PD tidak terlepas dari posisi PD yang memiliki kekuatan politik baik di legislatif daerah maupun di masyarakat.

Sejumlah nama calon gubernur (cagub) yang mendaftar di Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PD Kalimantan Barat (Kalbar), harus menunggu keputusan Majelis Tinggi partai. Pasalnya, keputusan akhir ada di Majelis Tinggi partai yang secara otomatis diketuai oleh Ketua Dewan Pembina Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hal ini

sebagaimana dikemukakan oleh Sekretaris DPD PD Provinsi Kalimantan Barat bahwa : “kalau penentuan cagub dari Partai Demokrat di semua daerah di Indonesia sama, termasuk Kalbar, tergantung Majelis Tinggi Partai Demokrat yang dalam hal ini diketuai oleh Pak SBY”.

Pada akhirnya, pada Pilgub Kalbar 2012 dengan menempatkan kader PD sebagai wakil dan bukan sebagai calon gubernur, sejalan dengan itu dalam wawancara yang dilakukan dengan Ketua DPD PD Suryadman Gidot, mengatakan bahwa tidak ada alasan atau kepentingan lain PD memutuskan untuk berkoalisi dengan PDIP pada pilgub Kalbar tahun 2012, semata-mata hanya melihat bahwa Cornelis dan Christiandi Sanjaya memiliki peluang menang dan sosok figur yang bagus dan tokoh masyarakat Dayak dan putra terbaik Kalbar yang sangat populer.

Bertitik tolak dari hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa PD lebih mengutamakan aspek kemenangan calon yang diusung dibandingkan dengan mengutamakan kader partai untuk menjadi calon kepala daerah. Dapat dikatakan bahwa kaderisasi dari PD kurang berjalan dengan baik, karena terlihat kurang mempersiapkan kadernya jauh-jauh hari untuk menghadapi pemilihan gubernur. Meskipun dalam koalisi yang dibangun dengan PDIP, PD tetap menempatkan kadernya, tetapi posisinya adalah sebagai wakil, tentu saja apabila terjadi keberhasilan pembangunan yang memperoleh manfaatnya adalah PDIP, karena bagaimanapun masyarakat akan menilai figur pemimpin nomor satu, dan bukan wakilnya, meskipun wakilnya juga berkontribusi dalam keberhasilan pembangunan tersebut.

Seperti penjelasan-perjelasan terdahulu, bahwa koalisi antara parpol di pemerintahan merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari. Apalagi ditengah-tengah pragmatisme politik yang mewarnai proses demokrasi di Indonesia, semua partai berlomba-lomba untuk menjadi pemenang meskipun harus mengorbankan ideologi partai dan garis perjuangan partai. Bahkan tidak jarang partai harus mengorbankan kadernya demi untuk memperoleh kemenangan.

Pada pemilihan gubernur Kalimantan Barat tahun 2012, fenomena koalisi antara parpol juga tidak bisa dihindari. PDIP yang dulu dengan gagah dan percaya diri mengusung pasangan Cornelis dan Christiandi sebagai Cagub dan Cawagub tanpa melakukan koalisi dengan partai lain berhasil memenangkan pemilihan gubernur. Bahkan kemenangan tersebut terbilang fantastis karena berhasil menggulingkan *incumbent*. Kondisi berbeda terjadi pada pemilihan gubernur tahun 2012, PDIP yang mengusung *incumbent* dan sebagai partai yang memperoleh kursi terbanyak di DPRD Provinsi Kalimantan Barat, harus melakukan koalisi dengan beberapa partai seperti PD, PKB, PDS, PPIB. Hal ini mengindikasikan bahwa ada semacam tidak percaya diri terhadap kemampuan untuk mempertahankan posisi sebagai *incumbent*.

Koalisi yang terbangun dengan beberapa partai tersebut sangat kontras, hal ini dikarenakan PDIP dan PD di pusat memiliki posisi yang berbeda, demikian juga partai lainnya yaitu PKB yang merupakan partai Islam dan PDS yang merupakan partai kristen. Sesuai dengan fokus penelitian untuk melihat proses terbentuknya koalisi antara PDIP dan PD pada pemilihan gubernur Kalimantan Barat tahun 2012, sangat menarik untuk mengetahui latar belakang terbentuknya koalisi tersebut.

Pada awalnya PDIP mengusung pasangan *incumbent* sebagai calon gubernur, akan tetapi karena Christiandi sebagai wakil merupakan kader PD, maka harus terlebih dahulu menjalin koalisi dengan PD. Dalam hal ini Cornelis juga mendaftarkan diri di PD sebagai calon Gubernur, kendati dari persyaratan PDIP bisa mencalonkan Cornelis tanpa berkoalisi.

Proses rekrutmen calon gubernur yang dilakukan oleh PD, akhirnya memutuskan untuk mendukung Cornelis sebagai calon gubernur dan Christiandi sebagai wakil gubernur. Penetapan terhadap calon gubernur dan wakil gubernur tersebut di dasarkan atas Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor : 135/SK/DPP.PD/VI/2012 tentang Dukungan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat periode 2012-2017.

Berdasarkan SK tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan PD akhirnya memutuskan Cornelis sebagai Calon gubernur yang berasal dari PDIP dan Christiandi sebagai wakil gubernur dikarenakan di tubuh PD tidak terdapat kader internal yang mendaftar sebagai kandidat calon gubernur memiliki nilai jual dan populer di masyarakat untuk dapat memenangkan pemilihan gubernur Kalimantan Barat. Artinya bahwa dengan alasan pertimbangan hasil survey dan popularitas, serta dukungan dari elit ditingkat kabupaten dan kecamatan, PD memutuskan untuk berkoalisi dengan PDIP mendukung Cornelis sebagai calon gubernur dan kadernya Christiandi sebagai wakil gubernur.

Proses terbentuknya koalisi antara PDIP dan PD di pemilihan gubernur Kalimantan Barat tahun 2012 tidak terlepas dari keahlihan dan kecerdikan Cornelis dalam melakukan pendekatan/komunikasi dan lobi-lobi politik. Bahkan jauh hari sebelum adanya gagasan untuk berkoalisi dengan PD, sinyal bahwa PDIP terutama Cornelis untuk mengandeng PD sebagai bagian dari upaya untuk mempersiapkan pencalonannya kembali sebagai gubernur sudah terlihat sejak Christiandi masuk dalam kepengurusan DPD PD Provinsi Kalimantan Barat dan menempati posisi strategis sebagai Ketua Majelis Partai Daerah. Pada waktu memenangkan pemilihan gubernur tahun 2007 Christiandi bukanlah sebagai kader PD. Semakin kuatnya sinyal bahwa PDIP akan berkoalisi dengan PD pada pemilihan gubernur Kalimantan Barat tahun 2012 semakin tampak ketika pada pelaksanaan pemilihan struktur kepengurusan DPD PD Kalimantan Barat berhasil memilih Suryadman Gidot sebagai Ketua DPD PD.

Hubungan baik yang terjalin antara Cornelis selaku Ketua DPD PDIP Kalimantan Barat dengan petinggi DPD PD terutama Ketua DPD PD Suryadman Gidot, merupakan aspek penting yang memungkinkan terjadinya koalisi, dimana PDIP mengusung Cornelis sebagai Calon Gubernur dan PD mengusung Christiandi sebagai wakil gubernur. Kondisi bisa saja berbeda dalam arti koalisi dengan PD tidak akan terwujud manakala dalam pemilihan Ketua DPD PD yang terpilih bukan Suryadman Gidot, misalkan saja Mucha Mahendra yang pada saat itu juga sebagai calon ketua PD Kalbar.

Lebih jauh komunikasi politik untuk membangun koalisi yang dilakukan oleh Cornelis tidak hanya dilakukan pada tingkat DPD PD tetapi juga di tingkat pusat khususnya dengan Majelis Tinggi Partai yang dalam hal ini diketuai oleh SBY. Sebagaimana diungkapkan oleh Sekretaris DPD PDIP Kalimantan Barat sebagai berikut "Pak Cornelis mengaku sudah mengemukakan rencana koalisi antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Demokrat dalam Pemilihan Gubernur Kalbar kepada Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat yang juga Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. SBY selaku Dewan Pembina PD dan Ketua Majelis Tinggi Partai memberi respons positif atas rencana koalisi itu, karena ini adalah koalisi dua partai besar dan bisa mengurangi ketegangan politik di daerah".

Kondisi tersebut secara jelas menunjukkan bahwa terciptanya koalisi antara PDIP dan PD serta beberapa partai lainnya, tidak terlepas dari kemampuan lobi politik yang dimiliki oleh Cornelis sebagai figur sentral PDIP di Kalbar. Lobi politik yang dilakukan oleh Cornelis tidak hanya pada tingkat DPD tetapi juga kepada DPP termasuk dengan melobi langsung Dewan Pembina Pusat PD yaitu SBY. Sejalan dengan itu, dapat pula dianalisis bahwa adanya desu dari SBY selaku Ketua Majelis Tinggi Partai untuk mendukung duet Cornelis dan Christiandy sebagai pasangan incumbent untuk kembali berpasangan dalam pemilihan Gubernur Kalimantan Barat dikarenakan adanya hubungan hirarkis antara SBY dan Cornelis. SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai juga merupakan Presiden RI, sementara Cornelis masih menjabat sebagai Gubernur. Hubungan antara atasan dan bawahan ini tentu saja merupakan alasan lain yang memungkinkan terjadinya koalisi. Apalagi selama kepemimpinan Cornelis dimata pemerintah pusat cukup berhasil, pemerintah pusat dalam hal ini presiden tentu ingin agar tiap-tiap daerah dapat mengamankan jalannya pembangunan, karena keberhasilan pembangunan di daerah juga merupakan cermin keberhasilan pembangunan secara nasional.

Terjadinya proses koalisi tidak terlepas dari adanya hubungan “*take and give*”. Dalam arti kata bahwa ada hubungan saling memberi dan menerima atau sering disebut dengan istilah simbiosis mutualisme di kedua partai. Tidak dapat disangkal bahwa proses pembentukan koalisi berisikan serangkaian negosiasi alot yang terjadi di antara petinggi-petinggi partai. Salah satu persoalan yang dibicarakan adalah *power sharing* di antara partai-partai peserta koalisi. Ini berarti para tokoh partai membicarakan apa yang mereka berikan kepada koalisi dan apa yang akan mereka terima. Ada juga yang mengatakan itu sebagai bargaining (tawar-menawar) yang didasarkan pada bargaining position (posisi tawar-menawar) setiap partai. Tentu saja setiap partai harus mengajukan tuntutan sesuai posisi yang dipunyainya dalam proses tawar-menawar tersebut. Partai yang mempunyai posisi tawar-menawar yang kuat akan mengajukan tuntutan yang tinggi.

Sementara menyangkut deal-deal politik sehingga memutuskan untuk berkoalisi dengan PDIP, Ketua DPD PD Kalimantan Barat juga menegaskan bahwa : ”tidak ada deal-deal yang terjadi selama yang diketahui oleh saya (Suryadman Gidot) bahkan kita instruksikan seluruh DPD dan DPC maupun PAC yang ada di Kalbar untuk menghidupkan mesin politik dan membangun soliditas mesin politik mendukung pasangan Cornelis dan Christiani Sanjaya dalam pilgub Kalbar tahun 2012”.

Proses terbentuknya koalisi melalui lobi-lobi dan negosiasi yang diwarnai oleh proses tawar-menawar adalah inti dari demokrasi. Tawar-menawar dalam politik bukanlah sesuatu yang tabu/buruk, dan jahat karena hal itu adalah proses yang wajar untuk mencapai keputusan. Tidak ada demokrasi yang tidak melakukan negosiasi dan tawar-menawar karena beragannya kepentingan yang ada di dalam masyarakat. Masing-masing partai yang mempunyai kepentingan yang berbeda ingin memperjuangkan kepentingannya itu sehingga dapat terwujud sebagai kebijakan nasional, antara lain berupa undang-undang. Demokrasi menuntut agar semua kepentingan tersebut diperjuangkan secara damai sehingga negosiasi dan tawar-menawar harus dilakukan secara damai pula.

Demokrasi memberi peluang bagi elit untuk terbentuk secara bebas dan memberikan kompetisi yang pemilihan umum untuk menentukan siapa yang akan menjadi *governing elite* selama lima tahun kedepan. Seperti halnya dengan pemilihan kepala daerah yang merupakan momentum dari sirkulasi elit ini. Dimana elit-elit tersebut bersaing memperebutkan kekuasaan yang sifatnya terbatas, atau dalam konteks ini beraturan antar elit untuk memperebutkan kekuasaan. Hal ini dapat dilihat dengan dilaksanakannya memperebutkan jabatan kepala daerah dan wakilnya.

Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa pada pemilihan Gubernur Kalimantan Barat ini dapat dikatakan menarik karena terdapatnya *governing elite* yang bersaing, yang satu *governing elite* di kelompok ini sendiri dan yang satunya lagi *governing elite* tapi dari kelompok lain. Sebagaimana yang Pareto sampaikan pada jenis pergantian elit yang pertama yaitu pergantian diantara *governing elite* itu sendiri. Karena jabatan kepala daerah sebagai kekuasaan structural dalam bentuk otoritas formal yang jumlahnya terbatas, maka terjadilah hal yang tidak dapat dielakkan yaitu persaingan antara pasangan elit yang satu dengan pasangan elit yang lainnya.

b. Bentuk dan Sifat Kelembagaan Koalisi yang Terbilang.

Sebagai produk dari reformasi, peralihan kekuasaan dilakukan melalui sebuah kompetisi terbuka dan telah diatur dalam perangkat peraturan perundang-undangan. Salah satunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dimana isi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut mengatur tentang pemilihan kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Hal ini membuat banyaknya elit yang bertarung untuk mendapatkan jabatan sebagai kepala daerah. Jabatan kepala daerah adalah sebuah jabatan publik yang menggiurkan, karena Jabatan kepala daerah dapat diartikan sebagai kekuasaan dan kekuasaan tersebut merupakan suatu hal yang langka, maka dari itu tak mengherankan jika banyak elit lokal pun bersaing memburu kekuasaan yang sifatnya langka ini untuk bisa

menjadi dominan diantara elit politik yang ada, walaupun harga kekuasaan itu sangatlah mahal dan beresiko.

Sehubungan dengan koalisi yang terbangun antara PDIP dan PD pada pemilihan gubernur Kalimantan Barat, dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Sekretaris DPD PDIP Provinsi Kalimantan Barat memberikan keterangan sebagai berikut : “hubungan yang terbangun antara PDIP dan PD pada pemilihan gubernur Kalimantan Barat tahun 2012 dapat dikatakan bukan sebuah koalisi, karena koalisi itu sifatnya permanent. Tetapi lebih kepada kerjasama dalam rangka mendukung pasangan calon yang diusung oleh kedua partai. Tidak ada kontrak koalisi sebagaimana yang terjadi di tingkat pusat”.

Berangkat dari fakta di atas, menunjukkan bahwa karakter gerakan koalisi dari para elit politik belum memiliki kesetiaan demokrasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Little (2008) dalam karyanya *Democratic Piety* mengungkapkan bahwa demokrasi sebagai sistem tidak bisa menciptakan pemerintahan yang responsif apabila pragmatisme kekuasaan menghalalkan kesalahan demokrasi yaitu nilai dan cita-cita kemanusiaan.

Dinamika politik yang saat ini dimainkan oleh parpol adalah koalisi atau juga negosiasi. Koalisi secara kata dapat diartikan sebagai bergabung untuk dan koalisi dalam pemahaman ini adalah penggabungan parpol untuk menjagokan kandidat dengan harapan terjadi *power sharing* atau pembagian kekuasaan. Koalisi tidak berarti penggabungan ideologi, melainkan hanya bentuk fisiknya saja, sehingga dapat dikatakan bahwa koalisi hanya bersifat momentum semata atau insidental, lebih jauh lagi koalisi tidak bersifat menetap. Walaupun demikian koalisi tidak berarti terjadinya *power sharing* karena hal itu sangat bergantung pada system pemerintahan yang dianut, sehingga koalisi akan sangat bermanfaat jika sistem pemerintahan yang dipakai adalah sistem parlementer tetapi akan sangat bergantung pada presiden terpilih jika sistem yang dipakai adalah sistem presidensial.

Betepapun pentingnya figur, tentu peran parpol tetap tidak mungkin dinafikan begitu saja. Secara teoritis kuatnya dukungan (koalisi) terhadap figur terpilih akan menopang bangunan pemerintahan yang lebih kokoh dan stabil. Ini adalah persoalan lobi-lobi politik (*lobbying*), dimana pemerintah terpilih tidak mungkin bekerja sendiri, ia harus melibatkan juga partai yang memiliki perwakilan melalui orang-orang partai (fraksi) yang duduk di kursi dewan. Merekalah yang yang bisa mempengaruhi kinerja eksekutif melalui keberangannya dalam fungsi legislasi (Perca) dan fungsi budgeting (APBD). Lenanya dukungan legislatif akan berimbas terhadap kelancaran kinerja eksekutif. Akan tetapi melihat koalisi yang terjalin antara PDIP dan PD serta beberapa partai pendukung lainnya yang tidak dilandasi oleh kontrak koalisi yang kuat, bisa saja akan berimbas terhadap kinerja legislatif.

Berbicara tentang koalisi pemerintahan di Indonesia. Dalam ilmu politik, secara garis besar koalisi dikelompokkan atas dua. Pertama, *policy blind coalition*, yaitu koalisi yang tidak didasarkan atas pertimbangan kebijakan, tetapi untuk memaksimalkan kekuasaan (*office seeking*). Kedua, *policy-based coalition*, yaitu koalisi berdasarkan pada preferensi tujuan kebijakan yang hendak direalisasi (*policy seeking*). Kecenderungan yang terjadi dalam era Reformasi ini, forma koalisi yang dibangun adalah bentuk yang pertama. Koalisi tidak berdasarkan pertimbangan kebijakan, melainkan hanya untuk meraih kekuasaan.

Berdasarkan hasil penelitian dan mengacu pada konsep koalisi, maka dapat dikatakan bahwa koalisi yang terbangun antara PDIP dan PD di pemilihan gubernur Kalimantan Barat tahun 2012 merupakan koalisi yang dibentuk lebih didasarkan pada pragmatisme politik yaitu *policy blind coalition*, yaitu koalisi yang tidak didasarkan atas pertimbangan kebijakan, tetapi untuk memaksimalkan kekuasaan (*office seeking*), hal ini dikarenakan pasangan *incumbent* yang ingin mempertahankan posisinya berusaha semaksimal mungkin merangkul kekuatan politik partai lain agar mempermudah dalam mencari dukungan dari masyarakat. Karena bagaimanapun popularitas figur calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung harus didukung oleh kekuatan mesin partai. Keberhasilan mengantarkan kadernya

sebagai gubernur dan wakil gubernur merupakan tujuan yang ingin dicapai, serta berbagai kepentingan lainnya baik dari segi organisasi partai maupun elit partai.

2. Faktor yang Mempengaruhi Terbentuknya Koalisi PDIP Dan PD Pada Pemilihan Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012

Adapun temuan penelitian terkait dengan faktor yang mempengaruhi terbentuknya koalisi PDIP Dan PD pada pemilihan Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 sebagai berikut :

a. Faktor Figur Cornelis

Terjalannya koalisi antara PDIP dan PD serta beberapa parpol lainnya dalam pelaksanaan pemilihan gubernur Kalimantan Barat tahun 2012, tidak terlepas dari figur Cornelis. Sosok Cornelis dikenal sebagai politisi dan birokrat yang sudah memiliki jam terbang dan pengalaman yang cukup matang. Sebagai politisi karir politik Cornelis cukup cemerlang hingga berhasil menjadi ketua DPD PDIP Provinsi Kalimantan Barat. Sementara sebagai birokrat Cornelis memiliki jenjang karir yang baik, dimana kepemimpinannya dimulai dari bawah mulai dari Camat, Bupati bahkan hingga Gubernur.

Tidak hanya cemerlang dalam bidang politik dan birokrasi, sosok Cornelis juga menjadi figur yang dihormati di kalangan masyarakat khususnya Suku Dayak. Di kalangan masyarakat Dayak, Cornelis dinilai memiliki keberanian dan kemampuan untuk memimpin masyarakat Kalimantan Barat, dan saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Adat Dayak Kalimantan Barat. Tidak mengherankan manakala dukungan terhadap Cornelis yang berasal dari pemilih tradisional yang berada di daerah masih sangat kuat. Tidak hanya di kalangan masyarakat Dayak, figure Cornelis juga mampu merangkul beberapa tokoh masyarakat baik lintas agama, suku, adat dan profesi, sehingga dapat diterima di semua kalangan.

Figur Cornelis yang dinilai memiliki elektabilitas tinggi dibandingkan dengan calon kandidat lainnya, juga merupakan salah satu alasan akhirnya PD mendukung koalisi dengan mengusung kadernya Christiandi sebagai wakil untuk berpasangan kembali pada pemilihan Gubernur Kalbar tahun 2012. Keberhasilannya dalam memimpin Kalbar juga merupakan salah satu modal penting dalam melakukan koalisi dengan PD dan partai lainnya. Ketokohan Cornelis di dalam tubuh PDIP diakui oleh PD memang sulit dibendung, sementara untuk di PD sendiri belum ada kader partai yang mampu menandingi popularitas Cornelis. Sebut saja Milton Crosby yang juga kader PD saat ini popularitasnya masih jauh dibandingkan dengan Cornelis.

Terciptanya koalisi antara PDIP dan PD serta beberapa partai lainnya, juga tidak terlepas dari kemampuan lobi politik yang dimiliki oleh Cornelis sebagai figur sentral PDIP di Kalbar. Lobi politik yang dilakukan oleh Cornelis tidak hanya pada tingkat DPD tetapi juga kepada DPP termasuk dengan melobi langsung Dewan Pembina Pusat PD yaitu SBY. Kemampuan untuk meyakinkan para elit politik PD baik ditingkat DPD maupun DPP bahkan Majelis Tinggi Partai merupakan salah satu kunci keberhasilan Cornelis dalam membangun koalisi dengan PD di Pilgub Kalbar tahun 2012.

Tidak hanya mampu meyakinkan para elit PD di pusat dan didaerah, Cornelis juga mampu meyakinkan ketua umumnya sendiri yaitu Megawati Soekarno Putri untuk memberikan restu bagi dirinya untuk menyalin koalisi dengan PD dalam pemilihan gubernur Kalimantan Barat. Sebagaimana diketahui bahwa di tingkat pusat konflik elit antara petinggi PDIP terutama Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dengan Ketua Dewan Pembina PD Susilo Bambang Yudoyono turut mempengaruhi hubungan antara PDIP dan PD. Konflik elit ini pun ternyata berhasil diredam dengan kemampuan lobi yang dilakukan oleh Cornelis, kemampuan lobi ini juga ditopang oleh hubungan yang baik antara Cornelis dengan kedua petinggi partai tersebut.

b. Faktor Keberhasilan Pembangunan

Keberhasilan pasangan incumbent Cornelis dan Cristiandy dalam melaksanakan pembangunan di Kalimantan Barat merupakan modal penting bagi pasangan ini dalam mengikuti pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat. Tidak

mengerahkan dimata masyarakat/voters pasangan ini memiliki nilai jual tersendiri untuk dipilih kembali sebagai kepala daerah Kalimantan Barat. Hal ini juga yang mendorong PD untuk mendukung pasangan incumbent untuk tetap memimpin guna melanjutkan pembangunan di Kalimantan Barat.

Perkembangan dan kemajuan yang telah dicapai selama kurun waktu lima tahun terakhir, terlihat dari indikator makro pembangunan, baik pembangunan sosial maupun pembangunan ekonomi, yang senantiasa meningkat. Berdasarkan data yang diakses dari *website Pemprov. Kalbar.Htlm* tanggal 20/6-2013. Pada tahun 2008 capaian IPM Kalbar tercatat sebesar 68,17 poin, namun pada tahun 2011 telah mencapai 69,66 poin, tahun 2012 diperkirakan mencapai 70,22 poin. Hal ini berarti selama 4 tahun terakhir telah terjadi peningkatan sebesar 1,49 poin.

Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalbar terlihat dari turunnya angka kemiskinan tahun 2008 angka kemiskinan Kalbar 10,79 % pada tahun 2011 telah turun menjadi 2,31 % dan tahun 2012 diproyeksikan turun menjadi 7,81 %. Demikian juga dengan tingkat pengangguran pada tahun 2008 tercatat 5,41 % namun pada tahun 2011 terjadi penurunan sebesar 3,88 % hal ini telah menunjukkan bahwa selama empat tahun terakhir telah terjadi penurunan angka kemiskinan sebesar 1,53 %.

Capaian indikator makro pembangunan ekonomi, menunjukkan kondisi yang cukup mengembirakan. Pada tahun 2008 saat terjadi krisis ekonomi dunia yang dampaknya dirasakan masyarakat Kalbar. Laju pertumbuhan ekonomi Kalbar sebesar 4,45 % walaupun tahun 2009 pertumbuhan ekonomi harus turun menjadi 4,80 %, namun dapat bangkit kembali dan mencapai angka pertumbuhan sebesar 5,94 %.

Pertumbuhan PDRB per Kapita masyarakat Kalbar pada tahun 2008 baru mencapai Rp.11.36 juta, namun pada tahun 2011 telah meningkat cukup tajam sehingga mencapai Rp.15.08 juta dan diproyeksikan menjadi Rp.16.4 juta pada tahun 2012. Kondisi yang sama terjadi pula pada pengeluaran per kapita dimana pada tahun 2008 tercatat Rp. 624.740, namun pada tahun 2011 meningkat menjadi 635.850 dan pada tahun 2012 diproyeksikan meningkat menjadi Rp 639.220.

Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan pasangan incumbent yang berasal dari kader PDIP dan PD ini merupakan salah satu pertimbangan para elit partai baik di daerah maupun di pusat untuk tetap mengusung keduanya dalam pelaksanaan pemilihan gubernur Kalimantan Barat. Para elit partai melihat bahwa kedua pasangan ini masih layak untuk melanjutkan pembangunan di Kalimantan Barat. Meskipun berbeda bendera partai dan dipusat kedua partai menempati posisi yang berlawanan dimana yang satu sebagai oposisi sementara yang satu sebagai partai pemerintah.

c. Faktor Kesamaan Garis Perjuangan Partai

Pruman (1988) menyatakan bahwa platform partai adalah sebuah kontak dengan rakyat yang mengabsahkan keberadaan politisi dalam parlemen. Sementara jika kebijakan yang dibelakukan oleh partai pemenang pemilu mencerminkan apa yang telah mereka janjikan sebelum pemilu, maka ini menunjukkan bahwa konsituen telah menetapkan sebuah pilihan yang tepat.

Sehubungan proses koalisi yang terbangun antara PDIP dan PD pada pemilihan gubernur Kalimantan Barat tahun 2012, platform partai merupakan salah satu faktor pendukung terbentuknya koalisi antar kedua partai tersebut. Sebagaimana diungkapkan oleh Ketua DPD PD Provinsi Kalimantan Barat bahwa : "Partai Demokrat dan PDIP sebagai Partai yang memiliki garis ideologi nasionalis dan religius dengan sifat partai terbuka dan inklusif, dalam melaksanakan cita-cita partai ditunjukkan dalam semangat dan rasa kebangsaan dengan nilai moralitas dan spiritual keagamaan, kedua-dua partai dengan kekuatan politik mendukung Pemerintah Daerah untuk mengembangkan kebijakan yang pro rakyat termasuk dalam menentukan regulasi pengawasan bersumber dalam pandangan dari aspirasi masyarakat yang tidak boleh bertentangan dengan konstitusi".

Apa yang dilakukan oleh dari PD dalam membangun koalisi dengan PDIP pada pelaksanaan pemilihan gubernur Kalimantan Barat menunjukkan bahwa mereka memegang teguh platform partai. Lebih lanjut dari hasil wawancara penulis Ketua DPD PD Provinsi Kalimantan Barat Suryadman Gidot mengemukakan bahwa : "sebagai partai yang memiliki doktrin nasionalis religius Partai Demokrat sangat konsisten menjaga nilai-nilai kebangsaan dan pluralisme, oleh karena itu koalisi yang terbangun dengan PDIP bukan semata-mata untuk kepentingan pragmatis, tetapi lebih kepada mendukung pembangunan masyarakat di Kalimantan Barat sesuai dengan tujuan didirikannya PD, jika dilihat ada kesamaan dalam hal ideologi dan garis perjuangan partai, yaitu PD dan PDIP sama-sama partai yang menganut Pancasila dan UUD 45; PD dan PDIP sama-sama merupakan partai yang nasionalis terbuka untuk semua kalangan; memiliki kesamaan visi dalam membangun Kalbar menjadi lebih baik."

Berdasarkan keterangan di atas menunjukkan bahwa PD menggunakan platform partai sebagai landasan untuk melakukan koalisi dengan PDIP guna mewujudkan tujuan partai dengan memperjuangkan kepentingan masyarakat dan memelihara nilai-nilai nasionalis dan anti diskriminasi. Berbagai penjelasan di atas menunjukkan bahwa bagi PD platform yang telah dibuat bukan semata-mata sebagai alat pemikat yang dapat menjaring masyarakat atau kelompok-kelompok kepentingan lantas melupakannya begitu saja. Tetapi platform tersebut bagi PD dipandang sebagai kontrak kerja politik.

Sementara itu hasil wawancara penulis dengan M. Kebing, L selaku Sekretaris DPD PDIP Kalimantan Barat terkait dengan pertimbangan garis perjuangan PDIP dalam membangun koalisi dengan PD memberikan keterangan sebagai berikut : "dilihat dari platform dan garis perjuangan partai PDIP dan PD sama-sama partai nasionalis, sehingga tidak ada perbedaan dari aspek tersebut. Hanya saja perlu ditekankan bahwa hubungan antara PDIP dan PD pada pemilihan gubernur Kalimantan Barat tahun 2012 lebih kepada kerjasama dalam memenangkan calon yang diusung bukan dalam bentuk koalisi permanent".

Berdasarkan keterangan dari hasil wawancara penulis dengan kedua informan tersebut menunjukkan bahwa adanya kesamaan platform dan garis perjuangan partai merupakan modal untuk menyamakan persepsi guna membangun koalisi dalam menempatkan kader-kadernya menjadi kelapa daerah pada pemilihan gubernur Kalimantan Barat.

d. Faktor Pragmatisme Politik Partai

Koalisi yang terjalin antara PDIP dan PD merupakan cerminan pragmatisme politik ditinjau dari tingkat/aras lokal. Ada kecenderungan bahwa parpol di daerah lebih memilih calon kandidat yang dinilai memiliki peluang besar untuk memenangkan pelaksanaan pemilu/kada. Pragmatisme politik tidak hanya terjadi di tubuh PDIP tetapi juga PD. Di tubuh PDIP menunjukkan semacam kurang kepercayaan diri sehingga harus berupaya semaksimal mungkin melakukan lobi-lobi politik dengan partai lain yang bersedia untuk bergabung dalam koalisi. Sebagai incumbent yang memiliki kelebihan dibanding konstan lainnya memiliki modal kuat untuk mempertahankan eksistensinya. Namun demikian melihat konstelasi politik yang berkembang di Kalimantan Barat, PDIP merasa bahwa posisi cagubnya terancam manakala tidak menjalin koalisi dengan partai lain. Sikap konsisten untuk tidak berkoalisi dengan PD pun akhirnya melunak di pilgub Kalbar.

Pragmatisme politik juga ditunjukkan oleh PD, sebagai partai pemerintah, ditambah dengan kekuatan politik di legislative Provinsi Kalimantan Barat, PD seharusnya mampu mendorong kadernya sebagai gubernur dan bukan wakil gubernur. Akan tetapi karena orientasinya "yang penting menang", maka kader partai menjadi terabaikan. Seperti terungkap dari hasil wawancara penulis dengan Ketua DPD PD Kalimantan Barat Suryadman Gidot dengan mengatakan bahwa : "Dilihat dari peta kemenangan hasil pemilu tahun 2009 PD memang selayaknya maju tanpa koalisi, namun karena pertimbangan figur di PD belum siap. Dari pada maju kalah, karena ada figur yang cukup baik (incumbent/petahana) dan melalui segudang pengalaman politik dan tidak dipungkiri

memiliki modal dan figur yang mudah dijual, maka PD melakukan koalisi yang sifatnya tidak permanen, hanya bersifat sementara. Khusus pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2012. Dalam koalisi yang dibangun tidak ada yang berkontribusi besar antara PD dan PDIP, yang ada adalah kedua partai tersebut memiliki komitmen untuk membangun Kalbar yang lebih baik kedepannya”.

Pragmatisme politik yang ditunjukkan oleh PD, menunjukkan bahwa fungsi parpol sebagai sarana rekrutmen politik cenderung terabaikan. Apalagi dalam kaitannya melakukan kaderisasi bagi calon pemimpin. Jika dilihat dari aspek kemanfaatan maka dapat dikatakan bahwa pragmatisme politik itu hanya cenderung menguntungkan elit partai dibanding dengan manfaat bagi partai secara organisatoris.

e. Faktor Kelonggaran Sistem Pemerintahan

Koalisi antara partai dalam pelaksanaan pemilukada yang diwarnai pragmatisme politik tidak terlepas dari ciri malarutnya sistem pemerintahan di Indonesia. Praktik koalisi di Indonesia yang didorong oleh sistem multipartai dan sistem *proportional representation* justru melemahkan sistem presidensial dan mengganggu hubungan eksekutif dan legislatif. Untuk menghindari pembentukan koalisi tersebut, penataan sistem kepartaian dan sistem pemilu Indonesia perlu dilakukan.

Ketidakjelasan bentuk koalisi permanen di pemerintahan pusat dengan sistem presidensial juga berimbas dalam terhadap penyelenggaraan pemilukada. Di tengah pragmatisme politik, penyelenggaraan pemilukada terlihat beraturan khususnya dalam pengajuan calon kepala daerah. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tidak secara tegas mengatur bagaimana mekanisme koalisi partai dalam mengusung calon kepala daerah dalam pemilukada. Demikian pula sistem pemerintahan baik pusat maupun daerah tidak mengatur bagaimana hubungan antara partai baik oposisi maupun pemerintah dalam pelaksanaan kepala daerah.

Tidak mengherankan manakala PD dan PDIP bisa melakukan koalisi dalam pemilukada gubernur Kalimantan Barat, kendati di tingkat pusat posisi kedua partai tersebut saling bertolak belakang. Apabila ditelusuri koalisi ini memiliki pengaruh dalam ranah penyelenggaraan negara. Hal ini dimisalkan dalam implementasi kebijakan pemerintah pusat (nasional), sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan maka pemerintahan provinsi dalam hal ini gubernur harus mampu mengawal dan mengamankan kebijakan serta mengimplementasikan kebijakan tersebut. Akan tetapi apabila gubernur berasal dari partai oposisi, akan terjadi standar ganda terhadap kebijakan pemerintah tersebut.

Tidak adanya aturan yang jelas mengenai ketentuan pelaksanaan pemilukada terutama dalam proses pengusungan calon kepala daerah mengakibatkan koalisi transaksional antar partai tidak bisa dihindari. Dalam koalisi antara PD dan PDIP di pemilukada Kalimantan Barat, marut marut yang ditandai dengan pondasi koalisi yang lemah menyebabkan motif mencari keuntungan dan sikap politik para elit partai tidak terelakan.

PENUTUP

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa koalisi yang terdalin antara PDIP dan PD pada pemilihan gubernur Kalimantan Barat tahun 2012, merupakan hasil dari komunikasi politik berupa lobi-lobi yang dilakukan oleh kedua elit parpol tersebut di tingkat daerah dan pusat. Dalam hal ini Cornelis yang merupakan calon kandidat gubernur dari PDIP merupakan figure sentral terbentuknya koalisi, dengan melakukan lobi-lobi dengan petinggi PD di DPD maupun di pusat. Koalisi yang terbangun antara PDIP dengan PD pada pemilihan gubernur Kalimantan Barat tahun 2012, merupakan koalisi yang bersifat pragmatis. Hal ini dikarenakan koalisi tidak dibangun dengan pondasi yang kokoh (permanent) dan bersifat jangka pendek hanya untuk mendukung kemenangan pencalonan kembali pasangan incumbent yang merupakan kader PDIP dan PD. Terjalinnnya koalisi tersebut tidak terlepas dari merupakan figure sentral Cornelis yang melakukan lobi-lobi dengan petinggi PD di DPD maupun di pusat termasuk dengan Majelis Tinggi Partai PD. Terbentuknya koalisi antara PDIP dan PD pada pemilihan gubernur

Kalimantan Barat tahun 2012 dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu (1) Figur Cornelis, (2) Keberhasilan pembangunan; (3) Kesamaan garis perjuangan partai; (4) Pragmatisme politik partai; (5) Kelonggaran system pemerintahan.

Berdasarkan temuan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa rekomendasi yaitu pertama, koalisi yang terjalin dalam pelaksanaan pemilu harus dilaksanakan dalam kontrak koalisi yang permanent, dalam arti bahwa koalisi tidak hanya bersifat pragmatisme. Etika politik harus dikedepankan dalam pembentukan koalisi tersebut, setiap parpol harus mengutamakan kepentingan organisasi dibandingkan kepentingan elit. Adanya koalisi yang permanent maka gabungan partai politik tersebut dapat berkontribusi dalam mendukung pelaksanaan program-program kerja baik jangka pendek maupun jangka panjang dari visi dan misi yang diusung oleh partai koalisi. Kedua, dalam pelaksanaan pemilu parpol perlu mempersiapkan kader terbaiknya sejak awal dengan mengelektrifikasi fungsi rekrutmen partai, sehingga parpol memiliki kader yang siap untuk bertanding dalam pemilu tanpa berkoalisi dengan partai lain. Figure Cornelis dapat dijadikan sebagai acuan bagi parpol dalam melakukan kaderisasi yaitu sosok yang tidak hanya piawai dalam birokrasi tetapi juga politik, ketiga, perlu adanya regulasi yang mengatur tentang koalisi dalam penyelenggaraan pemilu, sehingga setiap parpol dapat melaksanakan koalisi sesuai dengan posisi partai tersebut di tingkat pusat.

DAFTAR REFERENSI

- Apter, David. 1985. *Pengantar Analisa Politik*. LP3ES.
- Bambang, Cinto. 2000. *Prospek dan Tantangan Partai Politik*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Budiarjo, Miriam. 2006. *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi revisi)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Chilcote, Ronald. H. 2003. *Teori Perbandingan Politik, Penelusuran Paradigma*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Durberger, Maurice. 1982. *Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajawali
- Ejiyanto, 2009. *Mesin Partai atau Popularitas Kandidat ? Kajian Bulanan Lingkaran Survei Indonesia*.
- Eriawan, I Ketut Putra. 2005. *Mission Possible? Reformasi Kepartaian di Indonesia*. Draft Materi Pengantar Diklat Penguatan Kapasitas Partai Politik.
- Firmazah. 2008. *Marketing Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Gaffar, Afan. 1999. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Pustaka Pelajar.
- Gatari, A.A. Sahid, M.Si. 2007. *Sosiologi Politik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Henneberg, S.C. 2007. *The Views of An Advocants Dei: Political Marketing and its Critics*. Journal of Public Affair, Vol 4, No 3.
- Imawan, Rswandha. 2004. *Partai Politik di Indonesia: Pergulatan Setengah Hati Mencari Jati Diri*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM.
- Katz, Richard S dan Mair Peter. 1995. *Changing Models Of Party organization and Party Democracy: the Emergence of teh Cartel Party*. London: Journal Of Party Politics.
- Kartodirjo, Sarono. 1981. *Elit Dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta: ELSAM.
- Khoirudin, 2004. *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi, Menakar Kinerja Partai Politik Era Transisi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kotler, Philip and Neil. 1999. *Principles of Marketing*. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Lijphart, Arend. 1995. *Sistem Pemerintahan Parlemen dan Presidensial*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Lilleker, Darrem G. 2003. *Political Marketing, A Comapative Perspective*. London: Routledge.
- Macridis, Roy C. 1996. *Teori-Teori Mutalhir Partai Politik*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Michels, Robert. 1984. *Partai Politik: Kecenderungan Oligarkis dalam Birokrasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Nursal, Adnan. 2004. *Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Pemungkas, Sigit. 2010. *Pemilu, Perilaku pemilih dan Kepartaian*. Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism.
- Prihatmoko, J. 2008. *Mendemokrasikan Pemilu*. Yogyakarta: Pustaka pelajar
- Rauf, Maswardi, 2001. *Konsensus dan Konflik Politik, Sebuah Penjejang Teoritis*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
- Ritzer, George. 2003. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Riker, William. 1962. *The Theory of Political Coalition*. New Haven & London: Yale University Press.
- Schammell. M. 1999. *Political Marketing: Lessons for Political Science*. Political Studies, Vol 47.
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Surbakti, Ramlan. 1999. *Memahami Ilmu politik*. Jakarta. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Varma, S.P. 1987. *Teori Politik Modern*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Winarno, Budi. 2007. *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*. Yogyakarta: Medpress.
- Yuda, Hanta AR. 2010. *Presidensialisme Setengah Hati*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Hasil Penelitian Terdahulu.
- Sri Astuti Bachari. 2007. *Politik Identitas Etnis Dayak Pada Pilkada Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007*. Bandung: Disertasi, Program Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran.
- Dokumen internet :
- Gubernur Sampaikan Dua Rancangan Peraturan Daerah Ke Legislatif, www.Google.Com Pemprov. Kalbar.Htm. diakses pada tanggal 20-6-2013.
- Little, Adrian. 2008. *Democratic Piety, Conflict, and Violence*. www.gagasanhukum.wordpress.com.
- Mongilala, Andika. 2010. *Teori Marketing Politik*. Webandikamongilala.wordpress.com.
- Romadhon, Firman. 2012. *Memilih Model Elit Untuk Memahami Masalah Kebijakan*. www.google.com/cumaisengajanh.blogspot.com.